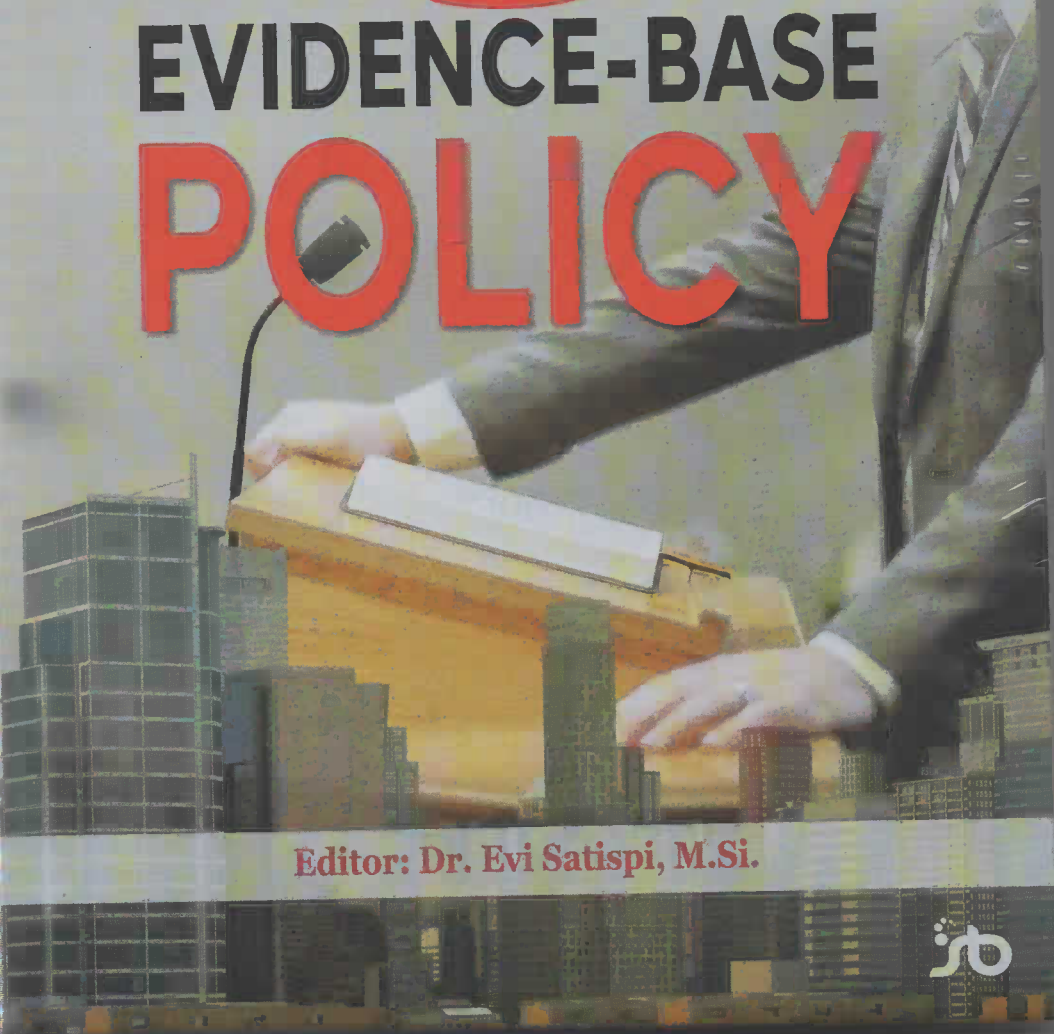


Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra - Prof. Dr. Andriansyah  
Prof. Dr. Agus Suradika - Dr. Muh. Kadarisman

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK & EVIDENCE-BASE POLICY



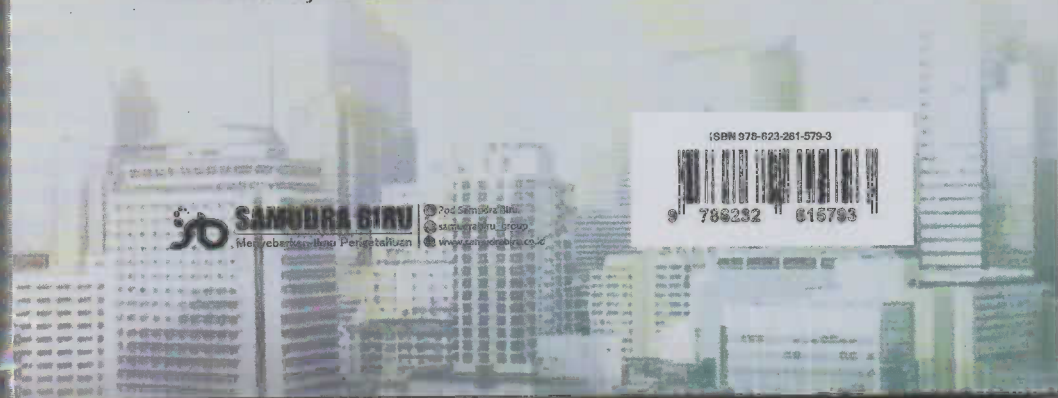
Editor: Dr. Evi Satispi, M.Si.



**P**enerbitan buku ini dimaksudkan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang kebijakan publik, serta untuk menambah buku pegangan bagi mahasiswa program studi Ilmu Administrasi, pascasarjana dan doktoral, khususnya konsentrasi Implementasi Kebijakan untuk Mitigasi Kebencanaan.

Pembahasan buku ini berfokus pada model dan konsep implementasi kebijakan publik dan kunci keberhasilan implementasi kebijakan publik di negara tertentu. Agar sebuah kebijakan publik dapat berhasil guna, maka di dalam implementasi kebijakan, pemerintah diharapkan menemukan bukti-bukti penting perubahan kebijakan ke depan, sejalan dengan perkembangan kondisi sebuah negara.

Karenanya buku ini dilengkapi dengan konsep *Evidence Base-Policy*. EBP mensyaratkan setiap kebijakan pemerintah haruslah didasarkan pada basis bukti autentik dan teknik menerapkan EBP di negara berkembang. Terakhir yang paling penting itu ialah bagaimana mengemas isu-isu *Evidence-Base Policy* sambil mengimplementasikan sebuah kebijakan. Terima kasih diucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu terbitnya buku ini, termasuk mahasiswa program Doktor Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta.



**IMPLEMENTASI  
KEBIJAKAN PUBLIK  
&  
EVIDENCE-BASE POLICY**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang. Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK & EVIDENCE-BASE POLICY**

## **Editor**

Dr. Evi Satispi, MSi

## **Penulis**

Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra

Prof. Dr. Andriansyah

Prof. Dr. Agus Suradika

Dr. Kadarisman



## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK & EVIDENCE-BASE POLICY**

© Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra, dkk.

xvi + 252 halaman; 14 x 20 cm.

ISBN: 978-623-261-579-3

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun juga tanpa izin tertulis dari penerbit.

### **Cetakan I, Maret 2023**

Penulis : Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra, dkk.

Editor : Dr. Evi Satispi, MSi

Sampul : Fendi

Layout : Bagus

Diterbitkan oleh:

**Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)**

Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno B.22 RT 12/30

Banguntapan Bantul DI Yogyakarta

Email: [admin@samudrabiru.co.id](mailto:admin@samudrabiru.co.id)

Website: [www.samudrabiru.co.id](http://www.samudrabiru.co.id)

WA/Call: 0812-2607-5872

# PRAKATA

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera kepada pembaca dan kami menyampaikan do'a kepada Allah SWT, semoga kita diberikan kesehatan, kebahagiaan dan rezeki yang halal oleh Allah Subhanallah ta'ala.

Penerbitan buku ini dimaksudkan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang Kebijakan Publik, disamping untuk menambah buku pegangan bagi mahasiswa program studi ilmu administrasi, Pascasarjana dan doktoral. Pembahasan buku ini berfokus pada **Model dan Konsep Implementasi Kebijakan Publik** dan kunci keberhasilan implementasi kebijakan publik di negara tertentu yang disadur dari beberapa buku dan pendapat para ahli. Agar sebuah kebijakan publik dapat berhasil guna maka di dalam implementasi kebijakan, diharapkan pemerintah

mendasarinya dengan bukti-bukti penting sebelum sebuah kebijakan dibuat.

Karenanya, buku ini dilengkapi dengan **Konsep Evidence Base Policy**. EBP mensyaratkan setiap kebijakan pemerintah haruslah didasarkan pada basis bukti yang kuat, otentik, valid, dan teknik penerapannya benar. Terakhir yang paling penting ialah bagaimana mengemas isu-isu Evidence-Base Policy menjadi input pada seluruh tahapan kebijakan publik.

Terima kasih diucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu terbitnya buku ini termasuk mahasiswa program Doktor ilmu administrasi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Wabillahi Taufik walhidayah,  
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Maret 2023

**Tim Penulis**



# DAFTAR ISI

<b>PRAKATA.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENGANTAR.....</b>	<b>1</b>
A. Pendahuluan.....	1
B. Terminologi Kebijakan.....	4
<b>BAB 2 KONSEP DAN DIMENSI KEBIJAKAN PUBLIK.....</b>	<b>23</b>
A. Konsep Kebijakan Publik.....	23
B. Dimensi dan Pendekatan Kebijakan Publik.....	25
<b>BAB 3 PROSES KEBIJAKAN PUBLIK.....</b>	<b>35</b>
A. Pendahuluan.....	35
B. Bentuk Kebijakan Publik.....	42

C. Tujuan dan Fungsi Kebijakan Publik.....	46
D. Fungsi Kebijakan Publik .....	50

**BAB 4 MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK .....51**

A. Pendahuluan .....	51
B. Model Proses atau Alur Smith.....	52
C. Model Van Meter dan Van Horn .....	54
D. Model Hogwood and Gunn ( <i>The Top Down Approach</i> ).....	55
E. Model Hoogerwerf.....	56
F. Model Elmore .....	61
G. Model Transactional Model (Warwick).....	70
H. Model Gordon Chase.....	71
I. Model Grindle.....	75
J. Model George Edwards III .....	76
K. Model Mazmanian dan Sabatier .....	78
L. Model Nakamura dan Smallwood.....	80
M. Model Implementasi Kebijakan Publik Generasi I ( <i>Top-Down</i> ) .....	87
N. Model Implementasi Kebijakan Publik Generasi II ( <i>Bottom-Up</i> ).....	90
O. Model Implementasi Kebijakan Publik Generasi III ( <i>Hybrid</i> ) .....	91

<b>BAB 5 KUNCI KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK: STUDI KUALITATIF DI SLOVENIA.....</b>	<b>93</b>
A. Pendahuluan .....	93
B. Lingkungan kebijakan publik .....	97
C. Siklus Kebijakan Publik .....	99
D. Desain Penelitian .....	111
E. Analisis data .....	116
F. Analisis .....	131
G. Kesimpulan .....	147
<b>BAB 6 EVIDENCE-BASE POLICY.....</b>	<b>149</b>
A. Pendahuluan.....	149
C. Kebijakan Berbasis Bukti .....	151
D. EBP: Kondisi Yang Diperlukan.....	154
E. EBP untuk Negara Berkembang.....	155
F. Isu-isu Mengenai Praktik EBP .....	159
G. EBP: Sebuah Pendekatan Pragmatis .....	160
H. EBP dan Kecerdasan Buatan.....	163
I. Kecerdasan Buatan Berbasis Bukti .....	165
J. Pendekatan tiga langkah.....	168
K. <i>Black Swans</i> .....	173
L. Pra-Kondisi Untuk Mencapai Sukses .....	173

**BAB 7 MENGEMAS ISU UNTUK EVIDENCE-BASE**

**POLICY ..... 177**

- A. Pengantar .....177
- B. Kunci Masalah Sekitar EBP ..... 180
- C. Evidence untuk Proses Kebijakan .....181
- D. Jenis Bukti yang Berbeda .....181
- E. Hirarki Bukti.....182
- F. Upaya untuk Menetapkan Apa yang Berguna Bagi Pembuat Kebijakan.....184
- G. Lima hal yang mengurangi Kualitas EBP ..... 197
- H. EBP di Negara Berkembang .....199
- I. Memasukkan Bukti Ke dalam Kebijakan .....204

**BAB 8 PENDEKATAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI..... 213**

- A. Pengantar .....214
- B. Kebijakan Berbasis Bukti .....218

**DAFTAR PUSTAKA.....235**

**TENTANG PENULIS.....247**

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Urutan Kebijakan Publik.....	41
Gambar 4.1. Model Proses atau Alur Smith (1973).....	53
Gambar 4.2. Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Horn (1975).....	54
Gambar 3.4 Model Implementasi Kebijakan Publik .....	69
Gambar 4.4. <i>Implementation as a Political and Administrative Process</i> .....	76
Gambar 4.5. <i>Direct and Indirect Impact on Implementation</i> .....	78
Gambar 4.6. <i>Variables Involved In The Implementation Process</i> .....	79
Gambar 4.7. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik .....	83
Gambar 4.8. Teori Piramida dan Model Implementasi Kebijakan.....	86

Gambar 4.9. Model Pendekatan Proses Implementasi Kebijakan van Metter dan Van Horn .....	89
Gambar 5.1. Representasi Jaringan Hipotesis Pemangku Kepentingan Memiliki Dampak Positif Pada Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik. ....	120
Gambar 5.2. Representasi Jaringan Hipotesis Evaluasi Kebijakan Publik Tidak Dilakukan Secara Sistematis .....	122
Gambar 5.3. Representasi Jaringan Hipotesis Perubahan Pemerintahan Merupakan Ketidaksinambungan Pelaksanaan Kebijakan Publik .....	123
Gambar 5.4. Representasi Jaringan Hipotesis Kolaborasi Antara Berbagai Departemen Tidak Mencukupi...	125
Gambar 5.5. Representasi Jaringan Hipotesis Konsultasi Dengan Masyarakat Tidak Dilakukan Secara Sistematis .....	127
Gambar 5.6. Representasi Jaringan Hipotesis Slovenia Tidak Cukup Menegakkan Kekhususan Nasionalnya Dalam Dokumen UE dan Internasional .....	128
Gambar 5.7. Representasi Jaringan Hipotesis Dengan Tidak Adanya Strategi Resmi, Pengambilan Keputusan Dipindahkan Dari Tingkat Politik Ke Tingkat Administratif.....	129
Gambar 7.1. <i>The Dynamics of Evidence-based Policy</i> .....	179
Gambar 7.2. Step Uji Kebijakan Melalui Pilot Project Sebelum Diterapkan .....	180
Gambar 7.3. Siklus kebijakan.....	188

Gambar 7.4. Aliran bukti dalam proses kebijakan.....	192
Gambar 7.5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan Di Pemerintah .....	193
Gambar 9.1. Rata-Rata Nilai Ujian Nasional, Sekolah Pendidikan Dasar di Jakarta, 2018-2020.....	218





# DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Model Implementasi Kebijakan Nakamura dan Smallwood.....	80
Tabel 5.1. Teori Dan Faktor Utama Keberhasilan Desain Dan Implementasi Kebijakan Publik .....	108
Tabel 5.2. Skor Kotak Teratas Dan Dua Kotak Teratas Dengan Peringkat Untuk Relevansi Enam Faktor Yang Dianalisis.....	117
Tabel 6.1. Perbandingan antara metodologi kebijakan.....	169
Tabel 7.1. Komponen Proses Kebijakan dan Masalah Bukti Yang Berbeda .....	190
Tabel 8.1. Pendapat Informan Kunci Mengenai Penerapan Kebijakan Berbasis Bukti di Jakarta Timur .....	228



# BAB 1

## PENGANTAR

### A. Pendahuluan

Proses kebijakan publik dewasa ini telah menjadi sebuah kebutuhan, tuntutan, kepentingan, dan agenda setting semua pihak di dalam pemerintahan. Kebijakan publik dibuat untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat dengan berbagai aspek dan ketentuan yang berlaku di dalamnya. Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dalam pemerintahan, baik bersifat formal maupun informal.

Dye (1982) menjelaskan bahwa *policy is what ever governments choose to do or not to do*. Artinya bahwa apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan publik (Knoepfel et al., 2011c). Kebijakan publik